

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korea Selatan merupakan negara yang berada dikawasan Asia Timur dengan luas 99.274 km² dan memiliki sekitar 3.000 pulau. Pada saat berakhirnya Perang Dunia II, Korea dibagi menjadi dua bagian oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat tanpa melibatkan pihak Korea pada Konferensi Postdam (Juli – Agustus 1945). Uni Soviet memiliki Tentara Merah atau yang lebih dikenal dengan Tentara Uni Soviet yang telah menguasai bagian pararel 38 utara semenanjung Korea pada tanggal 10 Agustus 1945 sedangkan pasukan Amerika Serikat menguasai bagian pararel 38 selatan pada tanggal 26 Agustus 1945.¹

Pada 15 Agustus 1948 Korea Selatan resmi menjadi negara Republik dan menjadi awal munculnya konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Konflik tersebut masih terjadi hingga saat ini, Korea Utara terus melakukan percobaan nuklir terhadap Korea Selatan sehingga mengakibatkan konflik keamanan serius.

Berawal pada tahun 1986 Korea Utara memulai operasi reaktor nuklir berkekuatan 5 Megawatt di Yongbyon. Pada tahun 1993 Korea Utara mengumumkan menarik diri dari Perjanjian Anti Penyebaran Nuklir (NPT) namun kemudian menunda rencana itu. Tahun 1994 Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara menandatangani kesepakatan untuk menutup reaktor nuklir Yongbyon yang telah menggunakan plutonium sebagai bahan bakunya. Kemudian

¹ McCune, Shannon C, Physical Basis for Korean Boundaries, Far Eastern Quarterly (No. 5), 1946, hal. 286 dalam <https://media.neliti.com/media/publications/32070-ID-respon-amerika-serikat-terhadap-uji-coba-rudal-korea-utara-di-bawah-pemerintahan.pdf> diakses 10 Maret 2018.

sebagai gantinya AS “menghadiahi” dua buah reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik. Tahun 2002 Korea Utara telah mempunyai fasilitas untuk menghasilkan uranium. Tahun 2003 Korea Utara menarik diri dari Perjanjian Anti Penyebaran Nuklir (NPT). Kemudian pada saat rezim Kim Jong Il Korea Utara mengumumkan bersedia berunding di babak pertama pembicaraan enam negara yang meliputi Korut, Korsel, Tiongkok, AS, Jepang dan Rusia. Tahun 2005 Pyongyang mengumumkan mereka telah memiliki senjata nuklir. Pada 9 Oktober 2006 Korea Utara menggelar uji coba senjata nuklir pertama.²

Uji ledak senjata nuklir pertama terjadi di daerah pegunungan terpencil di timur laut Punggye-ri dan menghasilkan ledakan sekitar satu kilo ton dan terjadi getaran gempa berkekuatan 4,2 SR. Pada Mei 2009 terjadi uji coba senjata nuklir kedua yang menghasilkan ledakan dua sampai delapan kiloton dan gempa berkekuatan 4,7 SR. Kemudian pada Februari 2013 kembali terjadi percobaan senjata nuklir ketiga yang pertama dilakukan di era Kim Jong-Un. Menghasilkan ledakan berkekuatan enam hingga tujuh kiloton. Dampak tes senjata ini menimbulkan getaran gempa 5,1 SR yang terdeteksi sekitar 50km dari Kota Kilju, dekat situs nuklir Punggye-ri. Uji Coba kelima terjadi pada September 2016, dan ledakan yang dihasilkan sekitar 10 kiloton dan menimbulkan getaran gempa hingga 5.3 SR.³

² Kontributor Singapura, Ericssen, "Sejarah Pengembangan dan Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara", Kompas (Online), 4 September 2017, dalam <https://internasional.kompas.com/read/2017/09/04/22032581/sejarah-pengembangan-dan-uji-coba-senjata-nuklir-korea-utara>, diakses pada 19 Maret 2018.

³ Muhaimin, "Data Uji Coba Nuklir Korut dari Masa ke Masa" Sindo (Online), 4 September 2017 <https://international.sindonews.com/read/1236457/40/data-uji-coba-nuklir-korut-dari-masa-ke-masa-1504513133/> diakses pada 19 Maret 2018.

Pengembangan senjata nuklir yang Korea Utara lakukan tentu menjadi perhatian serta kekhawatiran berbagai pihak. Pengembangan senjata nuklir dianggap sebagai bentuk pertahanan rezim Korea Utara, dan dapat memperkuat militernya serta menjadi instrument dalam memanfaatkan Negara lain. Namun hal ini menjadi kecaman dari dunia internasional, karena dianggap membahayakan stabilitas dan keamanan internasional. PBB telah mengeluarkan berbagai sanksi terhadap Korea Utara, namun hal itu belum menghentikan pengembangan senjata nuklir di Korea Utara.

Pada 14 Oktober 2006 Dewan keamanan PBB membuat sebuah Resolusi yang mengharuskan Korea Utara tidak lagi melakukan uji coba nuklir, tidak meluncurkan rudal balistik, serta menanggalkan semua senjata nuklir dan program nuklirnya. PBB juga memberlakukan larangan ekspor dan impor produk militer Korea Utara. Pada 12 Juni 2009 PBB menjatuhkan sanksi ekonomi dan komersial lebih lanjut kepada Korea Utara serta mendesak negara-negara anggota PBB agar menggeledah kargo Korea Utara. Pada 23 Januari 2013 dibuat kembali resolusi sebagai sanksi setelah Korea Utara meluncurkan roket balistik pada 12 Desember 2012. Resolusi ini mengharuskan Korea Utara mematuhi resolusi sebelumnya dan melepaskan semua senjata nuklir serta program nuklirnya. Selain itu Korea Utara juga tidak diperbolehkan menggunakan teknologi rudal balistik, uji coba nuklir, atau melakukan provokasi. 7 Maret 2013 Sanksi kali ini dalam bentuk menghentikan transfer uang dan menutup Pyongyang dari sistem keuangan internasional. 2 Maret 2016, 15 anggota Dewan Keamanan PBB secara bulat memberikan suara setuju atas

sanksi terhadap Korea Utara. Sanksi itu antara lain embargo senjata. Melarang Korea Utara mengimpor semua produk yang mungkin dapat digunakan untuk tujuan militer, dan akan mendeportasi diplomat Korea Utara yang melakukan kegiatan ilegal. Setelah sanksi itu Korea Utara menembakkan beberapa proyektil ke arah Laut Jepang. 30 November 2016 PBB memberikan sanksi membatasi ekspor batu bara Korea Utara dan melarang ekspor tembaga, nikel, seng, dan perak. Sanksi ini dijatuhkan setelah uji coba nuklir kelima yang dilakukan Pyongyang pada bulan September.⁴

Pada 6 Maret 2017 Korea Utara kembali memanaskan suasana di Semenanjung Korea dengan meluncurkan empat rudal balistik dari wilayah Tongchang-ri. Tiga rudal balistik tersebut terjatuh ke laut Jepang. Sebelumnya Korea Utara sudah memberikan ancaman terkait peluncuran rudal balistiknya sebagai respons terhadap pelatihan militer *Foal Eagle* yang dilakukan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Korea Utara menganggap pelatihan tersebut adalah bentuk persiapan Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk melawan Korea Utara.⁵

Adanya konflik-konflik ketegangan di Semenanjung Korea kemudian membuat keadaan kawasan Asia Timur sendiri masih tidak menentu. Dari apa yang terjadi di negara-negara Asia Timur, pengembangan senjata nuklir Korea Utara telah membuat kawasan Asia Timur semakin kompleks dan tidak menentu. Pengembangan nuklir tersebut menimbulkan reaksi berantai yang dapat

⁴ Budi Riza, "Trump -- Kim, Gedung Putih Berharap Korea Utara Tepati Janji" Tempo (Online), 14 Maret 2018, dalam <https://dunia.tempo.co/read/1069531/trump-kim-gedung-putih-berharap-korea-utara-tepati-janji> diakses pada 19 maret 2018.

⁵ "Korea Utara luncurkan empat rudal balistik ke laut" BBC (Online), 6 Maret 2017 dalam <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39151595> diakses pada 19 Maret 2018.

meningkatkan ketegangan di kawasan Asia Timur. Bahkan bila uji coba dan atau penempatan nuklir Korea Utara tidak membuat Jepang, Korea Selatan, ataupun Taiwan untuk menjadi negara nuklir, namun dapat mengakibatkan perlombaan senjata konvensional di Asia Timur. Selain itu, pengembangan senjata nuklir Korea Utara dapat membuat aliansi AS dengan Korea Selatan ataupun Jepang semakin kuat. Mereka juga akan cenderung mempererat komitmen untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan bahkan mungkin peningkatan teknologi militer guna menangkali nuklir Korea Utara.⁶

Dengan adanya ancaman dan agresifnya Korea Utara membuat para penstudi saling bertentangan dalam memandang dampak yang diakibatkan oleh isu nuklir ini. Mengingat Korea Utara dan Tiongkok yang memiliki nuklir dan sangat agresif dalam pengembangan senjata-senjata berbasis nuklirnya untuk memperkuat keamanannya, negara-negara yang tidak memiliki nuklir sebagai senjata seperti Jepang dan Korea Selatan bukan tidak mungkin akan berpikir untuk mulai membangun program nuklir sebagai senjata. Bahkan Tiongkok pun menyatakan dukungannya kepada Korea Selatan dan Jepang untuk mengubah kebijakannya dengan membangun persenjataan nuklir. Permasalahan semakin diperkeruh dengan adanya konflik-konflik dan sengketa-sengketa yang melibatkan beberapa negara Asia Timur yang dapat memungkinkan timbulnya peperangan. Bila melihat kenyataan seperti, maka isu nuklir di Asia Timur

⁶ *ibid*

berimplikasi pada semakin menjauhnya negara-negara Asia Timur dari regionalisme.⁷

Sebagai langkah pertahanan keamanan maka Korea Selatan membangun sistem pertahanan rudal milik Amerika Serikat yang dinamakan *Terminal High Altitude Area Defense*. Dengan nama awal *Theater High Altitude Area Defense (THAAD)*, merupakan sistem peluru kendali (rudal) antibalistik Angkatan Darat Amerika Serikat yang dirancang untuk menembak jatuh rudal jarak dekat, sedang, dan menengah dengan menggunakan pendekatan mencegat rudal musuh dengan tembakan langsung (*hit-to-kill*).⁸

Pada tahun 1991 THAAD mulai dikembangkan ketika pasukan Irak melancarkan serangan terhadap target koalisi dengan rudal Scud buatan Rusia selama Perang Teluk. THAAD dikembangkan oleh Lockheed Martin, dengan masukan dari sejumlah perusahaan lain. Dalam sebuah dokumen yang dibuat pada bulan Januari 1994 berjudul "*Information on Theater High Altitude Area Defense System*" alasan dikembangkannya THAAD karena adanya pernyataan dari *Ballistic Missile Defense Organization* pada tahun 1992 bahwa, terdapat 30 jenis rudal balistik yang memiliki daya jelajah hingga 30 kilo meter yang dikembangkan oleh 19 negara di seluruh dunia. Studi tersebut juga menemukan 13 negara yang telah mengembangkan rudal balistik dengan daya jelajah hingga

⁷ Yudha Prawira, "Pengembangan Nuklir Korea Utara Implikasinya Terhadap Stabilitas Kawasan Asia Timur", Skripsi Hubungan Internasional, dalam repository.unpas.ac.id/27428/5/BAB%20I%20Yudha%20Prawira.docx diakses pada 19 Maret 2018.

⁸ Aaron Mehta, "PACOM Head Supports Exercises Near China, Talks THAAD", Defense News (Online), 25 Februari 2016 <https://www.defensenews.com/naval/2016/02/25/pacom-head-supports-exercises-near-Tiongkok-talks-thaad/> diakses pada 19 Maret 2018.

300 kilometer. Studi itu memprediksi pula bahwa rudal balistik berdaya jelajah yang mencapai 1.000 kilometer, hanya tinggal menunggu waktu saja. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pada tahun 1992, kontrak pembuatan THAAD diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pengembangan dan produksinya dimulai pada tahun 1996.⁹

THAAD merupakan sistem pertahanan canggih milik Amerika Serikat yang memiliki bagian penting dalam melindungi suatu wilayah dari serangan rudal. THAAD terdiri dari *Interceptor*, *Launchers*, *Radar*, *Fire Control Unit*, dan peralatan pendukung lainnya. Saat musuh menyerang dan meluncurkan rudalnya, radar THAAD akan bekerja mendeteksi ancaman yang datang tersebut. Selanjutnya, rudal yang mengancam tersebut akan identifikasi oleh sistem. Kemudian, *Interceptor* akan diluncurkan dari sebuah truk khusus peluncuran. Dengan memanfaatkan energi kinetik, *Interceptor* menghancurkan rudal yang menjadi ancaman tersebut.¹⁰

THAAD mampu mencegah serangan rudal diudara hingga mencapai jarak 200 km berketinggian maksimum 150 km dengan kecepatan 8,24 mach atau 10.175 km per jam. THAAD akan menembak jatuh rudal yang diluncurkan sebelum mendarat pada target. THAAD juga mampu mencegat rudal baik di dalam maupun diluar atmosfer. Dengan kemampuan tersebut THAAD dianggap sebagai sistem pertahanan dengan teknologi tercanggih saat ini.

⁹ Ahmad Zaenudin, "Melindungi Korea Selatan Dengan THAAD", Tirto.id (Online), 4 Mei 2017, dalam <https://tirto.id/melindungi-korea-selatan-dengan-thaad-cn1k>, diakses pada 20 Maret 2018

¹⁰ *Ibid.*

Menurut perusahaan kontraktor pembuat THAAD yaitu Lockheed Martin, menyatakan bahwa THAAD mendapatkan 100 persen kesuksesan, dalam 13 tes penerbangan berturut-turut sejak 2005, termasuk 11 kali keberhasilan dalam mencegat serangan. Dengan kecanggihannya tersebut Amerika Serikat memilih THAAD sebagai bentuk pertahanan Korea Selatan dari serangan Korea Utara.

Otoritas militer Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah sukses melakukan uji coba perisai rudal atau sistem antirudal THAAD di Samudera Pasifik untuk mengantisipasi serangan rudal Korea Utara.¹¹ Amerika Serikat meyakini bahwa THAAD merupakan pilihan tepat untuk melawan ancaman rudal Korea Selatan serta negara lain. Amerika Serikat merasa kondisi di Semenanjung Korea semakin memanas, ditambah uji coba nuklir dan peluncuran rudal yang dilakukan Korea Utara.

THAAD mulai terpasang di kawasan militer Seongju Korea Selatan pada 6 Maret 2017, terpasangannya THAAD sebagai pertahanan dalam menangani kecemasan akan percobaan nuklir yang mungkin saja sewaktu-waktu diluncurkan Korea Utara. Pemasangan sistem tersebut mulai dilakukan tepat sehari setelah Korea Utara meluncurkan empat rudal balistik, yang kemudian jatuh di perairan Jepang. Insiden rudal jatuh di perairan Jepang tersebut telah membuat Amerika Serikat mempercepat pemasangan sistem THAAD di Korea Selatan.¹²

¹¹ Huminca Sinaga, "Amerika Serikat Sukses Gelar Uji Coba Rudal THAAD" Pikiran Rakyat (Online), 12 Juli 2017 dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2017/07/12/amerika-serikat-sukses-gelar-uji-coba-rudal-thaad-405067> diakses pada 20 Maret 2018.

¹² "Amerika Serikat Pasang Peluncur THAAD tanpa Restu Korea Selatan" Pikiran Rakyat (Online), 30 Mei 2017 dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2017/05/30/amerika-serikat-pasang-peluncur-thaad-tanpa-restu-korea-selatan-402191> diakses 4 Maret 2018.

Namun ternyata keputusan Korea Selatan dalam membangun THAAD mengakibatkan kemarahan Negara lain yaitu Tiongkok. Berada dalam satu Kawasan membuat Tiongkok merasa terganggu dengan dibangunnya THAAD. Tiongkok khawatir adanya THAAD akan mengakibatkan tindakan spionase terhadap Tiongkok. Radar THAAD merupakan salah satu radar yang canggih teknologinya. Radar tersebut memungkinkan pemerintah AS mendeteksi Tiongkok secara lebih menyeluruh.¹³

Tiongkok merasa geram karena militer Amerika Serikat dipandang telah melakukan pelanggaran batas. Tiongkok juga khawatir pengadaan THAAD di Korea Selatan akan melemahkan kemampuan rudal balistiknya sendiri dan mengganggu keseimbangan keamanan regional.¹⁴ Tiongkok menganggap pengadaan THAAD di Korea Selatan hanya akan merugikan kepentingan negara-negara lain dikawasan tersebut namun tidak berpengaruh apa-apa terhadap Korea Utara.

Tiongkok juga melakukan aksi balasan dengan menghukum Korea Selatan karena menolak saran negara itu agar tidak memberikan lahannya dipakai Amerika Serikat untuk menempatkan sistem pertahanan rudal terancangihnya, THAAD. Bentuk hukuman Tiongkok ke Korea Selatan di antaranya dengan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ “Hadapi Rudal Korea Utara, Amerika Tempatkan THAAD di Korsel” Batam News (Online), 2 Mei 2017 dalam <http://batamnews.co.id/berita-22293-presiden-filipina-korea-utara-ingin-mengakhiri-dunia.html> 19 maret 2018.

menutup 85 toko milik perital raksasa Lotte dan melemahkan pasar penjualan Hyundai motor hingga 44 persen.¹⁵

Berdasarkan dari latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik untuk menguji dan mempelajari masalah tersebut. Dengan demikian penulis menentukan judul penelitian sebagai berikut: penelitian **“Respons Tiongkok terhadap Pengadaan *Terminal High Altitude Area Defense* di Korea Selatan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di pendahuluan yang telah diuraikan di atas, untuk memahami pokok permasalahan dalam praktikum ini, penulis merumuskan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana politik luar negeri Korea Selatan terhadap Tiongkok?
2. Bagaimana persepsi ancaman Tiongkok terhadap pengadaan *Terminal High Altitude Area Defense*?
3. Bagaimana dampak sanksi Tiongkok terhadap pengadaan *Terminal High Altitude Area Defense* di Korea Selatan?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan penulis, maka penulis perlu untuk membatasi masalah agar lebih memfokuskan masalah penelitian. Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup bagaimana Respons

¹⁵ “Protes Amerika Soal THAAD, Cina Hukuk Korea Selatan” Tempo.co (Online), 27 April 2017 dalam <https://metro.tempo.co/read/1075722/terganjal-peraturan-kemenkumham-warga-cina-tak-bisa-cuti> diakses pada 7 April 2018.

Tiongkok terhadap pengadaan *Terminal High Altitude Area Defense* di Korea Selatan sepanjang tahun 2017.

1.2.2 Perumusan Masalah

Agar memudahkan penulis dalam menganalisis suatu penelitian, maka diperlukan adanya rumusan masalah yang berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan penulis dan juga agar dalam pengembangan masalah tidak menyimpang dari topik yang dibahas. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: **“Bagaimana respons Tiongkok dalam pengadaan *Terminal High Altitude Area Defense* di Korea Selatan?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebagai upaya untuk mengungkapkan arah dan tujuan umum dari apa yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka penulis harus memiliki tujuan jelas berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan. Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk memahami bagaimana politik luar negeri Korea Selatan terhadap Tiongkok.
- b. Untuk memahami bagaimana persepsi ancaman Tiongkok terkait pengadaan *Terminal High Altitude Area Defense*.

- c. Untuk mengetahui bagaimanaa dampak sanksi Tiongkok terhadap pengadaan *Terminal High Altitude Area Defense* di Korea Selatan.

1.3.1 Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Strata satu (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung serta untuk mendapatkan gelar “Sarjana Ilmu Politik (S.IP)”.
- b. Memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pembendaharaan wawasan pengetahuan studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Pasundan Bandung.
- d. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna didalam memberikan informasi lebih jauh lagi bagi penulis mengenai kerjasama internasional khususnya berkenaan dengan penelitian terkait.